

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Hubungan Internasional**

Hubungan internasional berawal dari kontak dan interaksi di antara negara-negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, isu-isu internasional ini mengalami banyak perkembangan. negara ataupun aktor non-negara mulai menunjukkan ketertarikannya akan isu-isu internasional di luar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan kebudayaan.

Hubungan internasional bersifat sangat kompleks serta interdisipliner, karena di dalamnya terdapat bermacam-macam bangsa yang memiliki kedaulatan masing-masing. Sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan rumit daripada hubungan antar kelompok manusia di dalam suatu negara. Namun, pada dasarnya, tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara dan non-negara. Perilaku tersebut bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya.

Hubungan internasional yang pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi lintas batas negara oleh state actor maupun non-state actor memiliki berbagai macam pengertian. Dalam buku “Pengantar Ilmu Hubungan

Internasional” Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. menyatakan bahwa:

“Studi tentang hubungan internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar“ (Perwita & Yani, 2005 : 3-4).

Kajian Hubungan Internasional muncul sebagai studi mandiri terpisah dari ilmu politik ketika fakta mengungkap bahwa penduduk dunia terbagi ke dalam wilayah-wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara – negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia, yang kemudian negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang menjadi sebuah sistem global (Jackson & Sorensen, 2009: 2). Oleh karena itu kajian hubungan internasional diperlukan sebagai kajian khusus yang membahas interaksi antar bangsa-negara.

Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani menyatakan dalam buku Pengantar ilmu hubungan internasional :

“Hubungan Internasional adalah interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat dari adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi

tidak memungkinkan adanya suatu Negara yang menutup diri terhadap dunia luar.” (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Hubungan Internasional juga dimaknai sebagai ilmu untuk memahami sebab-akibat terjadinya konflik dan untuk membina dunia yang lebih damai. Dalam “The Dictionary of World Politics” mengartikan Hubungan Internasional sebagai seluruh interaksi aktor-aktor negara dengan melewati batas-batas negara (Kurian, 2002: 27). Hubungan Internasional dapat pula didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi (Mas’oed, 2004: 37).

Hubungan Internasional tidak hanya membahas hubungan antar negara atau antar pemerintah secara langsung g namun juga membahas berbagai transaksi ekonomi dan perdagangan, strategi atau penggunaan kekuatan militer, serta langkah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Holsti mengemukakan bahwa Hubungan Internasional tertuju pada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori pemerintah maupun tidak. Selanjutnya, hubungan Internasional juga membahas analisa kebijakan luar negeri atau proses politik antar bangsa, tetapi dengan memperhatikan seluruh segi hubungan itu (Holsti, 2006: 29).

Dinamika dalam Hubungan internasional dewasa ini sangat dinamis dengan adanya kemajuan teknologi lewat keberadaan smartphone maupun tablet

termutakhir yang tidak dapat dipungkiri memudahkan akses informasi dengan cepat dan tepat, meskipun tidak dapat dipungkiri hal ini juga yang semakin membuat kompleks dinamika dalam hubungan internasional. Kompleksitas hubungan internasional itu sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Jack C. Plano tentang hubungan internasional mencakup hubungan antar negara atau sebagai interaksi para aktor yang tindakan serta kondisinya dapat menimbulkan konsekuensi terhadap aktor lainnya untuk memberikan tanggapan.

Jackson dan George & Sorensen pun berpendapat, bahwa “Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga meliputi sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependensi perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak – hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya” (Jackson dan Sorensen, 2009:34).

### 2.1.3 Kepentingan Nasional

Dalam pandangan kaum realis, kepentingan nasional dapat diartikan sebagai power karena seringkali dijadikan instrumen oleh negara sebagai untuk dipergunakan dalam mengendalikan proses interaksi terhadap negara lainnya (Perwita dan yani, 2005 :35). Sementara menurut pandangan kaum neoliberal yang mengikuti teori Adam Smith menyatakan bahwa setiap individu mempunyai kebiasaan untuk mendapatkan kemakmuran adalah hal yang normal di dalam kehidupan umat manusia yang terkumpul menjadi suatu kesatuan (Burchill, 2005 :104).

Dalam kepentingan nasional peran ‘negara’ sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut. Seorang ahli, Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatas (Jackson dan Sorensen. 2009: 89). Sehingga ruang gerak yang dimiliki oleh suatu bangsa menjadi kontrol dari sebuah negara.

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu ‘power’ yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011:163). Seperti yang dipaparkan oleh Kindleberger mengenai kepentingan nasional;

“...hubungan antara negara tercipta karena adanya perbedaan keunggulan yang dimiliki tiap negara dalam memproduksi. Keunggulan komparatif (comparative advantage) tersebut membuka kesempatan pada spesialisasi yang dipilih tiap negara untuk menunjang pembangunan nasional sesuai kepentingan nasional...” (Kindlerberger, 1970:21)

Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan. Hal ini dapat menjelaskan bahwa kepentingan nasional sebuah negara bergantung dari sistem pemerintahan yang dimiliki, negara-negara yang menjadi partner dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah yang menjadikan negara tersebut menjadi seperti saat ini, merupakan tradisi politik. Sedangkan tradisi dalam konteks kultural dapat dilihat dari cara pandang bangsanya yang tercipta dari karakter manusianya sehingga menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadi tolak ukur negara sebelum memutuskan menjalankan kerjasama (Sitepu, 2011:165).

Kepentingan-kepentingan suatu negara dalam menjelaskan identitas mereka, memiliki kegunaan-kegunaan. Hal ini dalam penjelasan kepentingan nasional itu sendiri digambarkan oleh penjabaran James N. Rosenau yang mana kegunaan pertama, sebagai istilah analitis untuk menggambarkan, menjelaskan atau mengevaluasi politik luar negeri dan yang berikutnya yaitu sebagai alat tindakan politik yaitu sebagai sarana guna mengancam, membenarkan ataupun mengusulkan

suatu kebijakan (Mas'ood, 1994:34). Dari demikian negara yang menjalin kerjasama tidak akan menyesal suatu saat nanti. Kondisi ini memperjelas akan tindakan langsung maupun tidak langsung yang dapat menjadi bahan rujukan bagi pihak-pihak yang berencana melakukan kerjasama. Ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan pengamatan akan kondisi internal negara yang akan menjadi partner kerjasama.

### **2.1.2 Hubungan Luar Negeri**

Interaksi antar aktor dalam studi hubungan internasional dapat berupa hubungan bilateral, dan multilateral. Perwita berpendapat terdapat perbedaan mengenai interaksi berdasarkan: “Jumlah pihak yang melakukan interaksi, intensitas interaksi, serta pola interaksi yang terbentuk, dan di dalam hubungan internasional, interaksi yang terjadi antar aktor dapat dikenali karena intensitas keberulungannya sehingga membuat suatu jenis pola, sedangkan bentuk-bentuk interaksi berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan hubungan, antara lain dibedakan menjadi hubungan bilateral, trilateral, regional, dan multilateral/internasional” (Perwita & Yani, 2005: 42).

Bentuk-bentuk interaksi inilah yang disebut dengan hubungan luar negeri. Adapun yang dimaksud dengan hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik diantara dua pihak. Hubungan luar negeri ini meliputi

interaksi yang menggambarkan suatu pola hubungan aksi dan reaksi. Adapun Hubungan aksi-reaksi ini melalui proses sebagai berikut:

1. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
  2. Persepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
  3. Respon atau aksi balik dari negara penerima.
  4. Persepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa.
- (Perwita & Yani, 2005: 42).

### **2.1.3 Politik Internasional**

Salah satu kajian dalam Hubungan Internasional adalah Politik Internasional yang mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan (interest) dan kekuasaan (power) (Perwita & Yani, 2005: 39). Politik internasional dapat dipahami sebagai bagian dari hubungan internasional, walau terminologi hubungan internasional, politik dunia, politik internasional sering digunakan secara sinonim (Viotti & Kauppi, 2012: 483). Menurut C.J. Johari ruang lingkup Hubungan Internasional meliputi seluruh tipe hubungan atau interaksi antar negara, termasuk asosiasi dan organisasi non-pemerintah (ekonomi, pariwisata, perdagangan, dsb). Sedangkan ruang lingkup Politik Internasional hanya terbatas pada “power game” yang melibatkan negara-negara berdaulat (Johari, 2009: 9).

Menurut Holsti studi Politik Internasional adalah studi mengenai pola tindakan negara terhadap lingkungan sebagai reaksi atas respon negara lain. Selain mencakup unsur power, kepentingan, dan tindakan, politik internasional juga

mencakup perhatian terhadap sistem internasional dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi konflik. Jadi politik internasional menggambarkan hubungan dua arah (reaksi dan respon) bukan aksi (Holsti, 2006: 38).

Perbedaan antara politik internasional dan politik luar negeri adalah, politik internasional mengkaji pola-pola yang berlaku dalam hubungan internasional, perilaku negara-negara serta para pembuat keputusan dalam situasi damai dan situasi konflik, serta melihat tingkah laku atau tindakan masing-masing negara dalam pola aksi-reaksi. Sedangkan politik luar negeri menganalisis bagaimana seharusnya tindakan atau langkah suatu negara terhadap kondisi serta perkembangan pada lingkungan eksternal (Rudy, 2002: 15).

Menurut Howard Lentner lewat bukunya "Foreign Policy Analysis", Politik internasional merupakan salah satu wujud dari interaksi dalam hubungan internasional. Politik internasional membahas keadaan politik di masyarakat internasional dalam artian lebih sempit, yaitu dengan berfokus pada diplomasi, hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya, dengan kata lain politik internasional adalah proses interaksi antara dua negara atau lebih (Perwita & Yani, 2005: 39).

Secara umum, objek dalam politik internasional juga merupakan objek dari politik luar negeri. Suatu analisis mengenai tindakan terhadap lingkungan eksternal serta berbagai kondisi domestik yang menopang formulasi tindakan merupakan kajian politik luar negeri, dan akan menjadi kajian politik internasional apabila tindakan tersebut dipandang sebagai salah satu pola tindakan suatu negara serta reaksi atau respon oleh negara lain. Pengaruh dapat langsung

ditujukan pada sasaran tetapi dapat juga merupakan limpahan dari suatu tindakan tertentu. Dimana selanjutnya dalam interaksi antarnegara, interaksi dilakukan berdasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara (Perwita & Yani, 2005: 41).

Dalam politik internasional proses interaksi berlangsung dalam suatu wadah atau lingkungan, atau suatu proses interaksi, interrelasi serta interplay (saling mempengaruhi) antara aktor dengan lingkungannya atau sebaliknya. Istilah politik internasional pada dasarnya merupakan istilah tradisional yang sangat menekankan interaksi para aktor negara. Namun, pola-pola interaksi politik dalam hubungan internasional kini sudah melibatkan interaksi antar aktor negara dengan aktor non-negara.

Arena politik internasional terbagi menjadi tiga, yaitu: global, region, dan nation-state yang memberikan dasar struktur analitis untuk pertimbangan politik internasional. Di dalam politik internasional, sebuah sistem merupakan keseluruhan hubungan yang berlangsung diantara unit-unit yang mempunyai kuasa di dalam arena khusus, ada tiga arena yang mewakili tiga sistem tersebut, yaitu:

1. Sistem dominan (the dominant system) yang berada di arena global, merupakan konfrontasi yang paling kuat dari negara-negara.

2. Sistem subordinat (the subordinate system) yang berada di suatu region, merupakan keseluruhan interaksi hubungan-hubungan diantara region tersebut.

3. Sistem internal (the internal system) yang berada di suatu negara (bangsa), merupakan keseluruhan hubungan-hubungan organisasi yang tersusun di dalam suatu politik domestik (Jemadu, 2008: 32).

### **2.1.5 Kebijakan Luar Negeri**

Pada dasarnya kebijakan luar negeri merujuk pada fenomena proses dimana negara-negara berupaya memenuhi kepentingan nasionalnya dalam masyarakat global. Kebijakan luar negeri muncul sebagai suatu fenomena sosial karena setiap negara tidak dapat memenuhi sendiri seluruh kebutuhan-kebutuhan sosial, politik, dan ekonominya bila hanya mengandalkan sumber daya yang terdapat di dalam teritorialnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah suatu negara pada umumnya akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tersebut di luar batas-batas wilayah teritorialnya atau dalam berhubungan dengan negara-negara lainnya pada arena internasional (Amstutz, 2013: 100).

Tindakan-tindakan eksternal negara tertuang dalam kebijakan luar negerinya meliputi berbagai macam jenis dan bentuk. Oleh karena itu, oleh beberapa ilmuwan, jenis dan bentuk tindakan eksternal suatu negara dikonsepsikan ke dalam beberapakategorisasi.

Rosenau dalam Perwita dan Yani mengkonsepsikan kebijakan luar negeri ke dalam tiga konsepsi, dimana satu sama lain saling terkait, yaitu:

1. Kebijakan luar negeri dalam pengertian seperangkat orientasi, yaitu berisikan seperangkat nilai-nilai ideal kebijakan luar negeri suatu negara yang menjadi panduan pelaksanaan kebijakan luar negeri negara yang bersangkutan.

Orientasi ini merupakan hasil dari pengalaman sejarah dan persepsi masyarakat terhadap letak strategis negaranya dalam politik dunia.

2. Kebijakan luar negeri dalam pengertian strategi atau rencana atau komitmen untuk bertindak (as a set of commitment and plans for action), yang berisikan cara-cara dan sarana-sarana yang dianggap mampu menjawab hambatan dan tantangan dari lingkungan eksternalnya. Strategi suatu negara ini didasari dari orientasi kebijakan luar negerinya, sebagai hasil interpretasi elit terhadap orientasi kebijakan luar negerinya dalam menghadapi berbagai situasi spesifik yang membutuhkan suatu strategi untuk menghadapi situasi tersebut.

3. Kebijakan luar negeri dalam pengertian bentuk perilaku (as a form of behavior), merupakan fase paling empiris dalam kebijakan luar negeri. Konsep ketiga ini merupakan langkah-langkah nyata yang diambil para pembuat keputusan dalam merespon kejadian dan situasi eksternal yang merupakan translasi dari orientasi dan artikulasi dari sasaran dan komitmen tertentu. Perilaku ini berbentuk baik tindakan-tindakan yang dilakukan maupun pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan pemerintah. Perilaku kebijakan luar negeri merupakan implementasi strategi kebijakan luar negeri suatu negara dalam situasi tertentu.

Tindakan-tindakan kebijakan luar negeri pada hakekatnya merupakan teknik-teknik yang digunakan sebagai sarana pencapaian tujuan kebijakan luar negeri yang ditetapkan dalam strategi kebijakan luar negeri. Tindakan kebijakan luar negeri ini dapat dibedakan berdasarkan teknik yang digunakannya. Menurut

Holsti, tindakan kebijakan luar negeri dapat dibedakan menurut sarana yang digunakannya, yaitu:

1. Diplomasi, merupakan upaya pemerintah untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan nasionalnya, rasionalisasi kepentingan tersebut, ancaman, janji, dan kemungkinan kesepakatan-kesepakatan yang dapat diterima dalam suatu isu kepada pemerintah negara lain. Diplomasi pada hakikatnya merupakan proses negosiasi dimana masing-masing pemerintah melakukan tawar-menawar dalam suatu isu tertentu demi mencapai kepentingan nasionalnya secara optimal melalui saluran-saluran resmi yang telah disepakati (Holsti, 2006: 89).

2. Propaganda, merupakan upaya-upaya pemerintah suatu negara untuk mempengaruhi perilaku dan opini publik asing atau negara lain sehingga sesuai dengan dengan yang diharapkan oleh pemerintah negara yang melakukan propaganda. Pemerintah berupaya mempengaruhi opini publik asing atau negara lain, dan atau kelompok etnik, religi, dan kelompok ekonomi tertentu dengan harapan bahwa publik ini pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku dan kebijakan pemerintahnya sesuai dengan harapan pemerintah negara yang melancarkan propaganda (Holsti, 2006: 142).

3. Ekonomi, merupakan upaya-upaya pemerintah untuk memanipulasi transaksi ekonomi internasional demi mencapai tujuan-tujuan nasionalnya. Bentuk manipulasi ini dapat berupa imbalan (rewards) maupun paksaan (coercion). Sebagai suatu sarana pemaksa, maka transaksi ekonomi internasional digunakan untuk memaksa pemerintah asing mengubah kebijakan-kebijakannya, baik domestik maupun luar negeri agar sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah

yang melancarkan ancaman tersebut. Sedangkan sebagai sarana imbalan, maka transaksi ekonomi internasional digunakan untuk mendukung agar pemerintah asing melakukan atau terus tindakan-tindakan yang diinginkan pemerintah yang melancarkan imbalan (Holsti, 2006: 174).

4. Militer, merupakan upaya-upaya pemerintah suatu negara untuk mempengaruhi perilaku dan kebijakan negara lain dengan menggunakan ancaman dan atau dukungan militer (Holsti, 2006: 152).

## **2.1.6 Idiosyncratic**

### **2.1.6.1 Definisi Idiosyncratic**

Dalam hubungan internasional, individu memiliki peranan penting, dimana dalam studi hubungan internasional para ahli menaruh perhatian atas perilaku individu, karena individu sebagai salah satu bagian dari pembuat keputusan atau kebijakan untuk mempengaruhi hasil dari politik luar negeri. Politik luar negeri merupakan suatu strategi untuk menghadapi politik internasional yang sedang berlangsung. Latar belakang individu ini akan sangat penting dan berpengaruh dalam setiap kebijakan politik luar negeri suatu negara.

Maka dalam membuat suatu kebijakan individu, suatu latar belakang, arus informasi yang diketahui, keinginan yang dimiliki serta tujuan yang hendak dicapai (*occasion for decision*) sangat mempengaruhi individu tersebut. Kuatnya pengaruh seorang individu dalam proses pembuatan keputusan, yang pada akhirnya memunculkan istilah *idiosyncratic* dalam politik luar negeri.

Idiosyncratic mempelajari hal-hal yang mempengaruhi seorang individu dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh pada hubungan luar negeri.

Hal ini diperjelas dimana dalam keberadaan politik luar negeri idiosyncratic merupakan salah satu faktor penentu dalam keberadaan politik luar negeri tersebut (Rosenau, 2006:15). Selain hal tersebut, terdapat kategori dalam asumsi-asumsi dasar pengaruh yang juga menempatkan idiosyncratic sebagai salah satu kategorinya (Perwita & Yani, 2005:32).

Idiosyncratic adalah penggabungan dua istilah dari kata ideology dan syncratic/syncratis. Ideologi menurut Anthonio Gramsci adalah kerangka atau paradigma analisis untuk memahami dan menyelesaikan berbagai masalah. Dan yang dimaksud syncratic adalah perpaduan semua yang baik dari semua yang ada. Idiosyncratic dapat digunakan dalam analisa politik luar negeri suatu negara bila pengaruh yang dihasilkan oleh seorang individu dalam pembuatan kebijakan adalah total.

Secara umum idiosyncratic yaitu segala aspek yang dimiliki oleh pembuat keputusan, nilai, bakat, dan pengalaman sebelumnya yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan ataupun pemutusan kebijakan yang dilakukannya. Singkatnya, Couloumbus dan Wolfe memaknai faktor idiosyncratic sebagai salah satu variabel yang berkaitan dengan persepsi, citra, dan karakteristik pribadi individu pembuat keputusan.

Sedangkan idiosyncratic berdasarkan pendapat H.C Warren yaitu keseluruhan pengaturan mental seseorang pada tahap manapun dalam perkembangannya (Mas'oe'd dan McAndrews, 2012: 35). Ini meliputi fase-fase

dari karakteristik manusia, intelektualitas, tempramen, keahlian moral, dan sikap yang telah dibangun dalam perjalanan hidup seseorang setelah memperhatikan perkembangan dalam fase-fase yang telah dibangun tersebut.

#### 2.1.6.2 Latar Belakang Dalam Politik Luar Negeri

Dalam memahami *idiosyncratic*, maka perlu dipelajari kepribadian suatu individu tersebut. Kepribadian suatu individu sering kali digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pribadi yang tertutup dan pribadi yang terbuka. Di sisi lain ada juga penggolongan kepribadian berdasarkan tinggi-rendahnya karakter dominasi seseorang. Etheredge mengemukakan bahwa kedua penggolongan tersebut berkaitan, sehingga dapat ditemukan karakteristik kepribadian yang dapat mempengaruhi politik luar negeri yaitu sebagai berikut:

##### 1. Block Leaders

Merupakan gabungan dari kepribadian yang tertutup dan sangat mendominasi. Individu memiliki ciri ulet dan mendominasi pada satu sentral.

##### 2. World Leaders

Merupakan gabungan dari kepribadian yang terbuka dan sangat mendominasi ciri-ciri dari pemimpin ini adalah kecenderungan mempergunakan kekuatan militer, fleksibel, dan pragmatis.

##### 3. Maintainers

Merupakan gabungan dari kepribadian yang tertutup dan kurang mendominasi. Memiliki kecenderungan untuk mempertahankan status quo.

#### 4. Conciliators

Merupakan gabungan dari kepribadian yang terbuka dan kurang mendominasi. Bercirikan penolong dan kurang konsisten (Amstutz, 2013: 89).

Margaret G. Hermann menjelaskan lebih lanjut karakter kepribadian yang ada dalam masing-masing pemimpin negara didunia, yaitu:

##### 1. Terlatih dalam urusan-urusan luar negeri (training in foreign affairs)

Terlatih disini bermakna individu tersebut memegang posisi penting dalam politik atau pemerintahan yang akan memberikan pengetahuan tentang urusan-urusan luar negeri dan proses pembuatan keputusan.

##### 2. Nasionalisme

Yaitu pengaruh dari perasaan emosional yang dimiliki terhadap bangsanya, khususnya rasa cinta tanah air. Intinya, mengenai ada-tidaknya tekanan agar menegakkan kehormatan dan kedaulatan negaranya.

##### 3. Percaya atas kemampuan sendiri dalam mengendalikan situasi (believe in one's own ability to control events)

Yaitu suatu pandangan individu dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat mengendalikan keadaan.

##### 4. Kebutuhan akan kekuatan

Yaitu mengenai perhatian individu untuk mendirikan, memelihara atau mengembalikan kekuatan negaranya.

##### 5. Kebutuhan akan persatuan

Yaitu suatu konseptualisasi dari perhatian akan kebutuhan untuk hubungan kekerabatan dan persatuan yang damai.

#### 6. Conceptual complexity

Yaitu tingkat perbedaan seseorang dalam menganalisa lingkungannya. Setiap individu memiliki pandangan yang berbeda dalam mengamati suatu kejadian.

#### 7. Rasa tidak percaya kepada orang lain

Yaitu karakter individu yang memiliki rasa penuh curiga atau ketidakpercayaan beserta perasaan ragu, kesukaran, tidak ingin memberi dan ketakutan akan orang lain. Sehingga meningkatnya prasangka buruk dan ragu terhadap orang lain (Rudy, 2002: 97).

Karakteristik individu akan menghasilkan perbedaan pada orientasi individu tersebut terhadap kepribadian politik. Didasari oleh kerangka yang diuraikan, maka Hermann dalam Falkowski memberikan karakteristik pribadi yang merefleksikan kepribadian politik, yaitu :

- Expansionist

Individu enggan kehilangan pengaruh dan kendali kekuasannya. Individu memiliki keinginan untuk memiliki kontrol yang besar (high need for power) namun memiliki kemampuan yang rendah dalam menyadari adanya beberapa alternatif pilihan pembuatan keputusan (low conceptual complexity) dan mempunyai ketidakpercayaan terhadap orang lain (high distrust of others). Namun individu yang berkarakter nasionalis mempunyai kehendak yang kuat dalam memelihara kedaulatan dan integrasi negara (high nationalism). Individu

tidak mementingkan arti hubungan pertemanan (low need for affiliation) dan mempunyai inisiatif yang tinggi (high believe in control over events). Tipe ini menekankan agresivitas dari paham realis dalam mewujudkan tujuannya.

- Active Independent

Individu tie ini mempunyai keinginan besar untuk turut serta dalam komunitas internasional tanpa membahayakan hubungan yang sudah terjalin dengan negara-negara lain. Individu akan berusaha mempertahankan kebebasan berusaha untuk menggalang hubungan sebanyak mungkin. Ciri-ciri dari individu yang termasuk golongan ini adalah high nasionalism, highconceptual complexity, low distrust of others, high believe in owncontrol, high need for affiliation, low need for power.

- Influential

Individu berhasrat untuk menjadi pusat dari lingkungan, memiliki kehendak dan hasrat untuk mempengaruhi kebijakan politik luar negeri negara lain. Individu ini percaya bahwa tujuannya adalah yang paling penting dibandingkan yang lain. Individu akan bersikap protektif akan negara-negara yang menentanginya. Ciri-cirinya adalah low nasionalism, low conceptual complexity, low distrust of others, high believe in own control, high need for affiliation, high need for power.

- Mediator

Jenis individu ini seringkali menggabungkan perbedaan diantara negara dan memainkan peran “go-between”. Pemimpin mendapatkan negara-negara sebagai perwujudan perdamaian dunia dan selalu mencoba untuk menyelesaikan permasalahan dunia. Ciri-cirinya adalah “low nasionalism”, “high conceptual

complexity”, “low distrust of others”, “high believe in own control”, “high need for affiliation”, “high need for power”. Pada umumnya pemimpin seperti ini senang berada dibelakang layar. Meskipun memberikan implikasi kepada negara lain namun menghindari intervensi.

- Opportunis

Individu yang berusaha untuk tampil bijaksana, dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari keadaan yang dihadapi. Pemimpin seperti ini biasanya mengeluarkan kebijakan berdasarkan apa yang ia anggap perlu dan sedikit mengesampingkan komitmen ideologi. Ciri-cirinya adalah low nasionalism, high conceptual complexity, low distrust of others, low believe in own control, low need for affiliation, low need for power.

- Participative

Mempunyai hasrat untuk memfasilitasi keterlibatan sebuah negara dalam arena internasional. Individu seperti ini tertarik untuk mencari yang berharga untuk negara dan mencari alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapi negara atau negara lain. Ciri-cirinya adalah low nasionalism, high conceptual complexity, low distrust of others, low believe in own control, high need for affiliation, low need for power (Surbakti, 2010: 20).

Baghat Korany berpendapat bahwa peran individu di dalam proses pembuatan keputusan, khususnya dalam merumuskan politik luar negeri sangat nyata di negara berkembang. Dimana pendekatan psikologis faktanya menjadi faktor penentu untuk mengkaji politik luar negeri negara berkembang. Oleh karena itu maka faktor idiosyncratic seorang individu dalam hal ini pemimpin

negara sangatlah berpengaruh pada perumusan politik luar negeri khususnya bagi negara berkembang (Korany, 2001: 8-9).

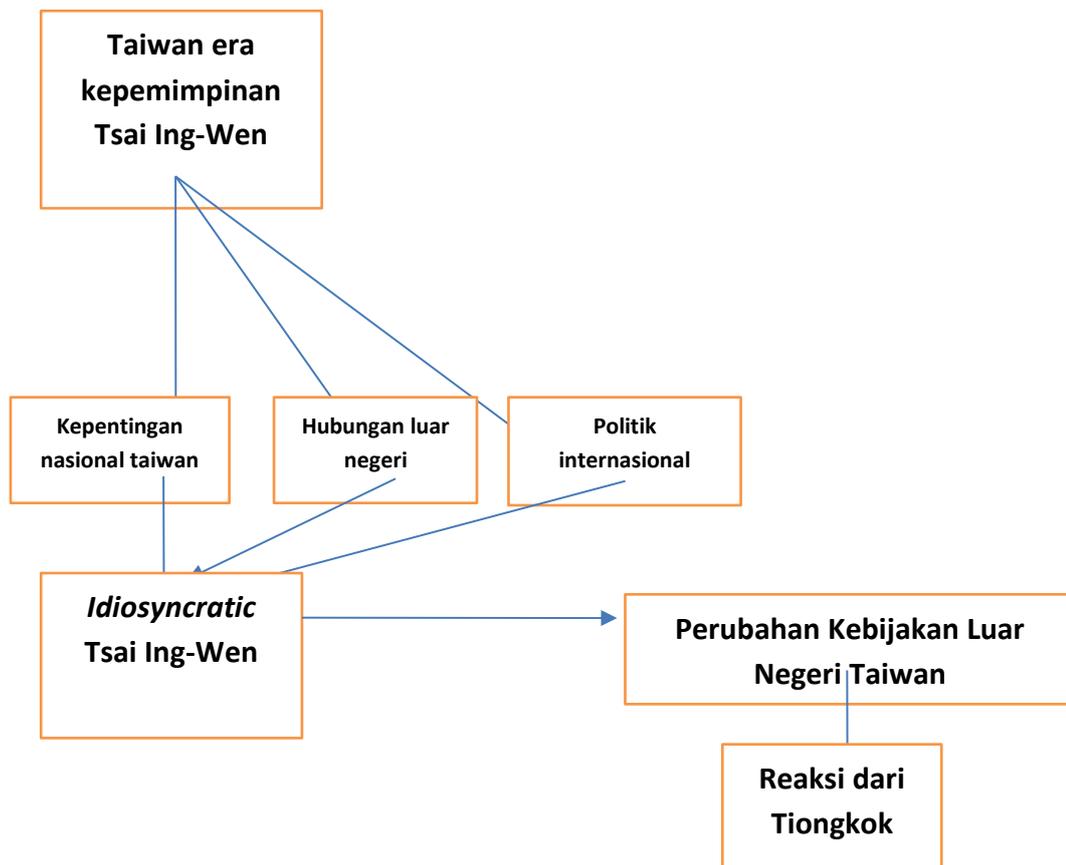
Menurut Rosenau, dari kelima faktor tersebut, akan ada selalu faktor yang lebih dominan dalam mempengaruhi politik luar negeri setiap negara dibandingkan faktor lainnya. Ini jelas berbeda untuk setiap negara yang tergantung dari kondisi geografis, yaitu ketersediaan sumber daya alam, kondisi perekonomian, serta status politik masing-masing negara.

Negara maju memiliki kecenderungan untuk menekankan peran sebagai faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan keputusan luar negeri tersebut, sedangkan negara berkembang faktor idiosyncratic pembuat keputusan atau seorang pemimpin menjadi faktor penentu dalam menentukan sikap politik luar negeri sebuah negara. Rosenau menyatakan hal itu dikarenakan oleh fakta dari negara-negara berkembang yang cenderung memiliki hambatan lebih besar terkait birokrasi dibandingkan negara-negara maju (Rosenau. 2006: 132).

Pendekatan dari teori-teori diatas akan digunakan oleh penulis untuk memaparkan kepemimpinan Tsai Ing-Wen sejak 2016 sebagai presiden wanita pertama Taiwan.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

*Cross-Strait relations* berubah total semenjak Tsai Ing-Wen menjabat pada tahun 2016. Sebelumnya, pada masa Taiwan dibawah kepemimpinan Ma Ying-Jeou, Taipei maupun Beijing jarang berseteru dan terjalin rasa saling membutuhkan diantara kedua pemerintahan ini. Banyak pengamat menilai terjadinya peningkatan hubungan bilateral yang sangat signifikan saat itu sebagai penanda reunifikasi.



Gambar 2.1

Alur kerangka Pemikiran